

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi Menurut Todaro (1999:45), dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan perekonomiannya. Sedangkan Menurut Tarigan (2004:49), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya dimana kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Selain itu menurut Tjokroaminoto (1992:102), pertumbuhan ekonomi sebagai suatu kenaikan terus menerus dalam produk perkapita atau tiap pekerja, seringkali diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk dan biasanya dengan perubahan struktural.

Menurut Hanafiah (1987:98) bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi

karena spesialisasi akan mempertinggi tingkat produktifitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

B. Konsep Perencanaan dan Pembangunan Wilayah

Konsep pembangunan ekonomi menurut Sukirno (1985:87), didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Arsyad (1999:57)

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya.

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional.

Bila berbicara tentang pendapatan perkapita, menurut Karjoredjo (1999:85),

Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah.

Sedangkan pendapatan nasional menurut Jhingan (2012:71) merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari

pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Pembangunan tidak lagi dapat dilihat sebagai subjek yang tunggal tetapi harus dilihat secara komprehensif atau berdimensi banyak. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tidak lagi menjadi tujuan dan tongkat pengukur keberhasilan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan hendaknya berorientasi pada aspek regional, dimana dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, setiap wilayah dilihat fungsi dan peranannya untuk masing-masing wilayah serta dilihat juga peranan dan fungsinya dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Hanafiah (1987:127) kegiatan perencanaan wilayah mencakup tiga kegiatan yang saling berkaitan, yaitu : (1) perencanaan antarwilayah dalam suatu negara, (2) perencanaan antarlokasi dalam suatu wilayah dan (3) perencanaan lokasi dalam tiap sektor.

C. Konsep Sektor Unggulan

Perencanaan pembangunan wilayah dari sudut pandang aspek ekonomi adalah penentuan peranan sektor-sektor pembangunan dalam mencapai target pertumbuhan yang selanjutnya diikuti oleh kegiatan investasi pembangunan baik investasi pemerintah maupun swasta. Tidak mungkin bagi suatu daerah untuk membiayai semua sektor secara bersama-sama karena keterbatasan sumber pendanaan. Untuk itu perlu ditetapkan suatu sektor unggulan (*leading sector*) dimana sektor ini diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor lainnya.

Kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan sektor unggulan (*leading sector*) adalah sektor-sektor yang :

- a) mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang relatif tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya
- b) menghasilkan *output bruto* yang relatif tinggi sehingga mampu mempertahankan permintaan akhir yang relatif tinggi pula
- c) mampu menghasilkan penerimaan devisa yang relatif tinggi
- d) mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang relatif tinggi

Syarat suatu sektor layak dijadikan sebagai unggulan di dalam perekonomian daerah ialah memiliki kontribusi yang dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian daerah serta mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya baik ke depan dan ke belakang yang besar. Untuk mengetahui prioritas pembangunan sektoral yang mengarah pada sektor unggulan, maka perlu diketahui dampak antar sektor dalam perekonomian. Dampak keterkaitan antars ektor akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sektor-sektor yang mempunyai peranan besar, baik bagi sektornya sendiri maupun sektor lainnya. Dengan demikian kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan perekonomian wilayah akan lebih diprioritaskan pada sektor tersebut.

D. Konsep Pembangunan Ekonomi

Definisi pembangunan ekonomi menurut Jhon Stuart Mill, dalam Jingham (2012:90) menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Sementara tanah dan tenaga kerja adalah dua faktor produksi yang asli, modal adalah persediaan yang dikumpulkan dari produk-produk tenaga kerja sebelumnya. Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibanding angkatan kerja. Kesejahteraan terdiri dari peralatan, mesin dan keterampilan angkatan kerja. Tenaga kerja produktif inilah yang merupakan pencipta kesejahteraan dan akumulasi modal.

Sedangkan definisi pembangunan menurut Sukirno (1985:69), untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktifitas tenaga kerja bertambah. Spesialisai dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi. Menurut Smith sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan menaikkan tingkat produktifitas tenaga kerja.

Menurut Karl Marx dalam Jingham (2012:73), teori pembangunan dalam tiga hal, yaitu dalam arti luas memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti sempit merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis dan terakhir menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana.

Menurut Marx, setiap struktur kelas masyarakat terdiri dari kelas pemilik tanah dan bukan pemilik tanah. Karena cara produksi tunduk pada perubahan maka evolusi masyarakat akan terjadi apabila kekuatan produksi bertentangan dengan struktur kelas masyarakat.

E. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut (Arsyad, 1999:40), Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material. Peningkatan taraf hidup masyarakat mencakup suatu perangkat cita-cita meliputi:

- a) Pembangunan harus bersifat rasionalistis, artinya bahwa haluan yang diambil harus berlandaskan pada pertimbangan rasional, berdasarkan fakta, sehingga nantinya merupakan suatu kerangka yang sinkron.
- b) Adanya rencana pembangunan dan proses pembangunan. Artinya, adanya keinginan untuk selalu membangun pada ukuran dan haluan yang terkoordinasi secara rasional dalam suatu sistem.
- c) Peningkatan produktifitas.
- d) Peningkatan standar kehidupan.

- e) Kedudukan, peranan, dan kesempatan yang sederajat dan sama di bidang politik, sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan.
- f) Pengembangan lembaga-lembaga sosial dan sikap-sikap dalam masyarakat.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam kerangka pembangunan daerah sesuai dengan tujuan diberlakukannya otonomi daerah ditunjukkan oleh pergeseran peranan pemerintah dari posisi yang sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pada peningkatan kemandirian daerah. Kebijakan-kebijakan pembangunan haruslah didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Orientasi ini mengerahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah bersama masyarakat harus mengambil inisiatif pembangunan daerah.

F. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Tarigan (2004:93), Pertumbuhan ekonomi daerah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh

perbedaan karakteristik *space* terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa sejarah perkembangan ekonomi itu melalui beberapa tingkat yaitu :

a) Masyarakat Tradisional

Fase ini ditandai dengan adanya fungsi produksi yang terbatas. Namun, dalam kenyataan yang sebenarnya perubahan-perubahan ekonomi selalu ada. Ini dapat dilihat dari adanya perubahan didalam perdagangan dan tingkat pertambahan produksi pertanian. Masyarakat pada fase ini tidak kekurangan akan penemuan-penemuan dan inovasi, tetapi belum ada pengertian sistematis terhadap alam sekitarnya yang dapat mendorong perkembangan lebih lanjut. Pengertian masyarakat pada fase ini terhadap perkembangan masa depan masih kurang. Hubungan keluarga masih erat dan berpengaruh besar dalam organisasi-organisasi sosial. Kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah yang luas.

b) Masyarakat Prasyarat untuk Lepas Landas (*precondition for take-off*)

Merupakan fase yang diperlukan agar perkembangan ekonomi dapat lepas landas (*take off*). Proses seluruhnya diperbaiki dengan adanya perluasan pasar dan koloni. Terdapat dua keadaan yang saling memengaruhi satu sama lain yaitu : (1) pertumbuhan perlahan-lahan (evolusi) dalam ilmu pengetahuan modern, (2) banyaknya inovasi yang dilakukan bersama-sama dengan penemuan daerah-daerah baru dalam sektor-sektor yang cukup penting, perluasan pasar untuk memajukan perdagangan dan meningkatkan spesialisasi produksi.

Masyarakat yang memasuki fase ini ditandai dengan tiga perubahan radikal. Pertama, adanya pembangunan fasilitas prasarana umum terutama dibidang

transportasi. Kedua, revolusi teknik di bidang pertanian yang ditandai dengan kenaikan produksi menggunakan teknik baru serta banyaknya urbanisasi. Ketiga, perluasan impor yang dibiayai oleh perdagangan komoditi sumber-sumber alam yang ada.

Secara positif dikatakan apabila pemerintah belum menaruh perhatian pada tiga sektor perkembangan tersebut, yaitu fasilitas umum, pertanian, dan perdagangan, maka fase lepas landas akan tertunda. Ketiga sektor tersebut adalah sektor-sektor yang penting untuk mengadakan perkembangan industri secara terus menerus.

c) Masyarakat Lepas Landas (*take off*)

Fase ini ditandai dengan penerapan teknik-teknik baru dalam industri sudah berjalan dengan sendirinya. Untuk masuk fase ini selain prasarana umum, pertanian dan perdagangan, harus ditambahkan dengan adanya golongan wiraswasta dan teknik-teknik baru serta sumber-sumber kapital yang teratur. Fase ini biasanya menandakan kemenangan-kemenangan sosial, politik dan kebudayaan. Perkembangan ini selanjutnya mendorong masyarakat untuk memusatkan pada usaha-usaha teknik modern diluar sektor-sektor yang telah dimodernisasi selama fase lepas landas.

d) Masyarakat Menuju Kematangan (*drive to maturity*)

Periode ketika masyarakat secara efektif menerapkan teknologi modern terhadap sumber-sumber ekonomi. Perluasan industrialisasi bukan lagi merupakan tujuan pokok, dikarenakan berlaku hukum *the law of diminishing marginal utility*. Sektor-sektor penting bukan hanya ditentukan oleh adanya teknologi tetapi juga kualitas persediaan sumber-sumber

ekonomi. Bila suatu masyarakat berkembang ke kematangan teknologi, maka struktur dan kualitas tenaga kerja berubah terutama pada perbandingan jumlah antara yang bekerja di sektor pertanian dan non pertanian.

e) Masyarakat Konsumsi yang Berlebih (*high mass consumption*)

Cara-cara yang digunakan dalam fase ini adalah (1) menyediakan atau menawarkan jaminan yang lebih baik, kemakmuran dan *leisure* kepada angkatan kerja dan disesuaikan dengan ukuran masyarakat setempat, (2) menyediakan konsumsi bagi setiap individu dalam porsi yang lebih banyak dan (3) mencari perluasan pengaruh bagi negara yang bersangkutan di mata dunia.

Teori yang membicarakan pertumbuhan regional ini dimulai dari teori yang dikutip dari ekonomi makro atau ekonomi pembangunan dengan mengubah batas wilayah yang disesuaikan dengan lingkungan operasionalnya, dilanjutkan dengan teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi regional.

Menurut Tarigan (2004) Teori Harrod – Domar didasarkan pada asumsi :

- a) Perekonomian bersifat tertutup
- b) Hasrat menabung ($MPS = S$) adalah konstan
- c) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constan return to scale*)
- d) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod – Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh

kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = K = n$$

dimana :

- g = *Growth* (tingkat pertumbuhan output)
- K = Capital (tingkat pertumbuhan modal)
- n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (*capital output ratio* = Rasio modal output).

1) Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dari Amerika Serikat dan T.W. Swan (1956) dari Australia. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya *output* yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L).

2) Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang Disinergikan

Teori pertumbuhan Jalur Cepat (*Turnpike*) diperkenalkan oleh Samuelson (1955). Setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor ini memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan (Tarigan, 2005). Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut

dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar.

3) Teori Basis Ekspor Richardson

Teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat didalam satu wilayah atas: pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan *service* (pelayanan atau nonbasis). Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan nonbasis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah itu sendiri.

G. Penelitian Yang Relevan

1. Galih Permatasari (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pengembangan Wilayah Melalui Analisis Sektor Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sragen menjelaskan tentang sektor basis dan non basis yang ada di Kabupaten Sragen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis LQ, *Shift Share* dan analisis SWOT. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Kabupaten Sragen berdasarkan analisis LQ di atas dari tahun 2006 sampai 2010 mempunyai 4 sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

Sektor non basis dalam analisis LQ Kabupaten Sragen dari tahun 2006-2010 di atas adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, Sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan

sektor pengangkutan dan komunikasi. Serta, Beberapa hal yang menjadi strategi pengembangan sektor potensial di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan kaderisasi masa depan bagi pertanian di Kabupaten Sragen.
- b) Agar kesempatan ekspor semakin luas dan produk – produk daerah semakin di kenal perlu adanya strategi salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan semakin memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing dengan daerah lain. Memperbaiki dan melakukan pemeliharaan terhadap infrastuktur daerah.
- c) Pemerintahan dan masyarakat bekerja sama untuk mewujudkan visi misi daerah.
- d) Semakin mengembangkan iklim usaha agar semakin tercipta lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran akan berkurang.
- e) Memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan agar semakin tercipta Sumber daya manusia yang unggul.

2. Sri Endang Kornita dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Ekonomi Basis Dan Potensi Sinergi Pembangunan Kabupaten Kampar Dan Kota Pekanbaru menjelaskan tentang ekonomi basis dan potensinya untuk pembangunan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis LQ dan analisis SWOT. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah :

- a) Sektor yang menonjol perannya dalam perekonomian Kota Pekanbaru secara berurut berdasarkan hasil analisis LQ adalah Sektor 4 (Listrik,

Gas, dan Air Minum), Sektor 8 (Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan), Sektor 5 (Bangunan), Sektor 7 (Pengangkutan dan Komunikasi), Sektor 9 (Jasa-jasa) dan Sektor 6 (Perdagangan, Hotel dan Restoran).

- b) Sinergi pembangunan antar daerah di Provinsi Riau belum terlaksana secara terkoordinasi, sampai saat ini baru sebatas arahan dalam *master plan* Riau 2020 dan konsep pada level pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota.
 - c) Arena sinergi kebijakan pembangunan daerah yang memiliki potensi sinergi antar Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dan merupakan sektor basis adalah sektor perdagangan di Kota Pekanbaru dan sektor pertanian di Kabupaten Kampar.
3. Ardian Kurniawan (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Struktur Ekonomi Serta Basis Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan tentang sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Shift Share* dan LQ. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :
- a) Dilihat dari PDRB Provinsi Kalimantan Barat 1998-2008 sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan maupun kontribusi terbesar ialah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa dan sektor bangunan.
 - b) Kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 1998-2008. Secara keseluruhan (Dij) tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tumbuh lebih cepat dibanding sektor sejenis dalam

perekonomian nasional walaupun kinerja perekonomian secara umum masih dirasakan kurang.

- c) Berdasarkan pendekatan analisis LQ Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 1998-2008 diketahui memiliki beberapa sektor unggulan yang dijadikan sebagai basis ekonomi yang memiliki nilai LQ >1 terbesar yakni sektor pertanian dengan rata-rata sebesar 1.60%, sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata sebesar 1.30%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1.26%, sektor bangunan sebesar 1.18%, dan sektor jasa-jasa sebesar 1.16%.
4. Sri Subanti dan Arif Rahman Hakim, (2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Tenggara Pendekatan Sektor Basis Dan Analisis Input - Output*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah LQ, *Shift Share*, analisis Basis Ekspor dan analisis Input Output. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
- a) Melalui analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode LQ, SS, dan analisis *Input-Output* untuk Sulawesi Tenggara diperoleh temuan sebagai berikut: Sektor pertanian, sektor bangunan/konstruksi, sektor pengangkutan & telekomunikasi, serta sektor jasa menjadi sektor basis di Sulawesi Tenggara,
- b) Pengganda sektor basis yang bernilai besar ada pada sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa,
- c) Sektor yang lain masuk kategori sektor yang tumbuh lambat namun punya daya saing tinggi seperti sektor pertanian dan sektor jasa.

5. Lapeti Sari (2010) dalam judulnya Analisis Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Location Quotient*, *Shift Share*, Kapasitas Fiskal Daerah dan Produktifitas Lahan dan Tenaga Kerja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :
- a) Faktor pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar yaitu sektor pertanian lebih disebabkan oleh membaiknya struktur ekonomi (53,24%), faktor luar (42,23%), dan kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif (4,52%).
 - b) Pada sektor perdagangan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor luar (32,85%) dan membaiknya struktur ekonomi Kabupaten Kampar (94,43%), sedangkan kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif (-27,28%) belum turut menentukan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar.
 - c) Pada sektor industri pertumbuhannya lebih ditentukan oleh kondisi spesifik daerah yang kompetitif yaitu sebesar 38,56%, dan ditentukan oleh faktor luar yaitu sebesar 31,74%, serta membaiknya struktur ekonomi yaitu sebesar 26,69%.